

EDITORIAL

Propaganda produk kebijakan pada perhelatan megademokrasi kali ini didominasi oleh pasangan calon (paslon) pemilihan presiden (pilpres). Kebijakan paslon pilpres dan program turunannya juga terpampang pada poster-poster propaganda calon legislatif (caleg). Produk kebijakan capres kerap dijadikan unggulan propaganda calon legislatif untuk mendongkrak popularitas.

Kontestasi pilpres kali ini melahirkan banyak kebijakan, yang layak sebagai barang dagangan. Sejatinya memang paslon wajib memiliki produk kebijakan beserta program turunannya sebagai jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Paslon, singkatnya seperti penaja barang dagangan. Kebijakan paslon itu sesungguhnya menjadi “mata uang” penting dalam perdagangan politik pada kontestasi pilpres kali ini.

William Parson benar ketika mengatakan bahwa dalam pemilu modern, diskursus kebijakan menjadi sarana utama bagi elektorat untuk terlibat dalam kegiatan “politik” dan persaingan elite politik. Realitas itu terlihat pada propaganda paslon yang menjajakan kebijakan dan program turunannya.¹

Paslon wajib memiliki kebijakan unggul. Memiliki kebijakan berarti memiliki alasan atau argumen yang mengandung klaim bahwa paslon memahami persoalan beserta solusinya. Kebijakan memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi. Perumusan kebijakan ini sejatinya harus melibatkan masyarakat, sehingga kebijakan dan program paslon tidak dianggap sekadar janji-janji surga yang segera akan dilupakan seiring usainya pemilu. Realitas ini tampaknya sering diabaikan, seperti dikatakan Peter Deleon dan Danielle M. Vogenbeck, analisis kebijakan tetap jauh dari pusat-pusat kekuasaan.²

¹ Wayne Parsons, *Public Policy* (Jakarta: Kencana, 2006), 14.

² Frank Fishcher, Gerald J. Miller, Maras S. Sidney, *Handbook Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Nusa Media, 2015), 3.

Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan paslon membuktikan bahwa paslon memiliki konstituen yang berencana memilih mereka. Suatu kebijakan yang unggul mencakup keputusan-keputusan beserta pelaksanaannya. Pelaksana dalam hal ini bukan hanya birokrasi tetapi juga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan itu. Masyarakat pemilih rasional membutuhkan pemaparan visi misi calon yang adalah kebijakan, platform, produk yang menjadi pembuktian bahwa paslon paham pergumulan bangsa ini, dan mampu membawa bangsa ini pada cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni negara adil dan makmur.

Sebuah kebijakan publik sejatinya tidak berisi keberpihakan pada kelompok tertentu yang mendiskriminasikan kelompok lain. Kebijakan publik merupakan aturan bersama yang dihasilkan dari konsensus bersama, apalagi untuk Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Kebijakan paslon yang didasarkan pada Pancasila sejatinya merupakan jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk memisahkan domain privat dan domain publik dibutuhkan kehati-hatian. Paslon harus berhati-hati dalam menggelontorkan kebijakan unggulnya agar jangan mendiskriminasikan individu atau kelompok tertentu dengan menghadirkan kebijakan diskriminatif yang pasti akan sulit untuk diimplementasikan. Mempromosikan kebijakan yang bertujuan mengintervensi ruang privat atau individu sebagai wujud keberpihakan pada individu atau kelompok tertentu mestinya tidak boleh terjadi jika perumusan kebijakan dilakukan berlandaskan pada Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika yang anti-diskriminasi.

Terkait dengan kondisi Indonesia saat ini jurnal *Societas Dei* menghadirkan pemikiran-pemikiran penting untuk menghadirkan kebijakan unggul di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Dr. Binsar Antoni Hutabarat yang diberi judul: "Evaluasi terhadap Rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan". Artikel ini sebagai

respons terhadap DPR RI yang belum lama ini mengagendakan untuk menggodok undang-undang baru soal permusikan. Namun, menurut Binsar, agenda permasalahan permusikan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam RUU Permukiman yang merupakan inisiatif DPR dapat disimpulkan belum menjadi kebutuhan pekerja musik Indonesia. Itulah sebabnya kehadiran RUU Permukiman ini menimbulkan penolakan dari banyak pekerja musik di Indonesia. RUU Permukiman belum dianggap sebagai kebutuhan permusikan di Indonesia karena penyusunan agenda persoalan permusikan di Indonesia tidak dilakukan dengan kehati-hatian, yakni dengan melibatkan stakeholder permusikan secara luas, selain itu waktu yang singkat dalam proses penyusunannya membuat isi materi RUU Permukiman tersebut menimbulkan kontroversi. Materi RUU Permukiman secara khusus terkait aturan proses kreatif tidak mampu memisahkan domain privat dan domain publik secara bijak. Pasal yang berisi aturan proses kreatif ditolak oleh banyak pekerja musik sebagai instrumen yang dapat membelenggu kebebasan insan permusikan. Substansi RUU Permukiman tidak menjawab kebutuhan mereka yang menjadi sasaran kebijakan karena perumusan kebijakan ini bersifat elitis.

Artikel kedua adalah karya Johanis Putratama Kamuri yang menyoroti tentang fenomena di tahun politik 2019 dengan tulisannya: "Hasrat Ekonomi Politisi dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019". Penulis menilai bahwa Pemilu 2019 diselenggarakan di tengah situasi politik Indonesia yang tidak ideal. Politisasi isu SARA yang berpotensi melahirkan disintegrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural, ujaran kebencian, kampanye hitam (*black campaign*), penyebaran hoaks dan politik uang yang menyebabkan tingginya biaya politik maupun korupsi, merupakan fenomena yang masif terjadi di Indonesia. Harapan untuk menjadikan Pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi terbesar dan terbaik di Indonesia terancam oleh situasi ini.

Ancaman ini tidak dapat dilepaskan dari penerapan strategi politik machiavellian. Politik kehadiran dan keberpihakan yang

menegaskan keluhuran budi politisi, politik pencitraan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang efektif dan agama sebagai salah satu dimensi hidup yang sakral di Indonesia telah dipolitisasi dan digunakan secara negatif.

Bentuk positif tiga strategi ini memungkinkan masyarakat untuk mengenal kandidat yang berkontestasi dan memilih kandidat dengan kualitas terbaik. Situasi ini menjamin kualitas pemerintahan dan kualitas demokrasi suatu bangsa. Namun bentuk negatif strategi machiavellian merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan keutuhan bangsa. Hal-hal yang baik dan bernilai luhur dimanfaatkan untuk menyembunyikan motivasi utama yang secara moral dan kultural dianggap tidak pantas, sehingga kontestasi menuju kekuasaan dapat dimenangkan. Kuasa yang diperebutkan dalam kontestasi ini tidak digunakan sebagai sarana mencapai tujuan politik ideal, keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi digunakan sebagai alat untuk mencapai dan memuaskan tujuan implisit politisi yakni hasrat ekonomi. Keuntungan personal dan kelompok pendukung menjadi tujuan tertinggi sedangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat tidak hanya diabaikan tapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan implisit.

Pemahaman terhadap situasi politik ini tidak hanya memberi peringatan tentang ancaman bagi demokrasi Indonesia tetapi juga memberi pengharapan. Hasrat ekonomi politisi yang diekspresikan melalui berbagai strategi yang mengancam demokrasi bukan ancaman terbesar. Ketidaksadaran akan situasi ini adalah ancaman terbesar. Kesadaran dan pemahaman terhadap tujuan implisit politisi dan berbagai ekspresinya memungkinkan masyarakat Indonesia untuk bertindak rasional dan memerjuangkan perbaikan kualitas demokrasi.

Andreas M. Putra membahas artikel tentang bagaimana "Menjadi Manusia Indonesia yang Otentik: Belajar dari Hans Kung". Menurut lulusan filsafat ini, adalah sebuah pertarungan memerjuangkan usaha memanusiakan manusia di tengah derasnya arus globalisasi yang memberi banyak dampak positif dalam mobilisasi interaksi masyarakat

sekaligus melahirkan *isme-isme* yang mencemaskan hajat hidup orang banyak. Namun kita boleh belajar dari Hans Kung dengan konsep-konsepnya yang sebetulnya bukan hal baru bagi kita. Konsep sederhana yang sering diabaikan. Setiap orang bisa menarik saripati pesan dari petunjuk kuno yang digagas Kung untuk diaplikasikan ke dalam tatanan global dan lokal. Secara khusus, dalam tatanan lokal, kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia, Kung menyajikan perspektif dan argumen yang bisa direfleksikan secara bersama-sama agar kita mampu hidup sehat dan sejahtera di bawah semangat Pancasila.

Mengapa semangat Pancasila? Di dalam era ketidaklogisan komunikasi, kehidupan sosial yang terfragmentasi, pragmatisme terhadap konsistensi, penting untuk mengembalikan Pancasila agar dihayati, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Yudi Latif dalam bukunya menggunakan konsep dari sejarawan Kuntowijoyo, *Radikalisasi Pancasila* mengatakan bahwa menjadi keharusan mengembalikan Pancasila kepada jalur ideologisnya sebagai ideologi negara dan juga diilmiahkan seperti ilmu. Pancasila juga harus berdialog dengan realitas sosial, menjadi kritik terhadap kebijakan negara serta mengubah paradigma dari melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi melayani kepentingan horizontal.³

Edy Syahputra Sihombing menulis “Reposisi Paradigma terhadap Alam Semesta: Tawaran Refleksi Filosofis dan Teologis”. Maka, segala yang berbeda dengan manusia di alam semesta ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai objek dalam kaca mata utilitas. Lebih lengkap lagi, kita meminjam analogi Sallie McFague, yang menggambarkan alam semesta ini sebagai tubuh Allah (*The Body of God*), dan Allah adalah Roh yang memberi kehidupan bagi dunia ini. Inspirasi kedua tokoh tadi menawarkan suatu cara pandang kesatuan manusia dengan alam semesta yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk alam yang

³ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011), 48.

saling terkait satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta ini. Spiritualitas demikian mendorong manusia untuk menghapus paradigma yang melihat dirinya terpisah dari alam sehingga tidak semena-mena mendominasi alam dan merusak alam. Dalam konsep ekumenis manusia menyadari bahwa ia adalah makhluk alam yang menyadari bahwa ia saling terkait dengan seluruh bagian alam semesta ini. Manusia membedakan diri dengan entitas lainnya tetapi tidak melepaskan diri dan bahkan tidak memisahkan diri dari alam.

Dan terakhir, John Musa Renhoard yang menulis topik: "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi", menyimpulkan bahwa politik identitas yang dimainkan pemerintahan Orde Baru untuk melatenkan kekuasaannya, ternyata tidak berhasil menyelamatkan kekuasaannya. Terbukti, konflik agama dalam skala yang besar terjadi pada akhir era Orde Baru. Politik agama yang dimainkan Orde Baru tersebut ternyata berdampak luas hingga era reformasi. Konflik dengan skala besar yang mengancam integrasi bangsa terus berlanjut pada awal era Reformasi. Pemerintah sepatutnya mewaspadaai usaha-usaha politisasi agama, sebab sikap diam pemerintah akan berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. Politik identitas Orde Baru harus dibayar mahal dengan konflik-konflik berkepanjangan di awal era Reformasi, dan hal itu mestinya menjadi alarm bagi pemerintah dan semua elemen bangsa supaya tidak mencoba-coba memainkan politik identitas.